

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI AKTIVITAS PENGAWASAN
DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN GO
PUBLIC DI INDONESIA**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

RESTRIA WIJAYA

NIM. C2C009082

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2013**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Restria Wijaya
Nim : C2C009082
Fakultas/Jurusan : Ekonomika Dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI AKTIVITAS
PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS PADA
PERUSAHAAN *GO PUBLIC* DI INDONESIA**
Dosen Pembimbing : Nur Cahyonowati, S.E, M.Si, Akt.

Semarang, 24 September 2013

Dosen Pembimbing

Nur Cahyonowati, S.E, M.Si, Akt.

NIP. 19810813 200801 2007

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama : Restria Wijaya
Nim : C2C009082
Fakultas/Jurusan : Ekonomika Dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI AKTIVITAS
PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS PADA
PERUSAHAAN *GO PUBLIC* DI INDONESIA**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 9 Oktober 2013

Tim Penguji:

1. Nur Cahyonowati, S.E., M.Si, Akt. (.....)
2. Dr. Hj. Indira Januarti, M.Si, Akt (.....)
3. Drs. Sudarno, M.Si, Akt, Ph.D (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini, saya Restria Wijaya, menyatakan bahwa skripsi dengan judul **Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Aktivitas Pengawasan Dewan Komisaris Pada Perusahaan Go Public di Indonesia** adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 24 September 2013

Yang membuat pernyataan,

(Restria Wijaya)

NIM. C2C009082

ABSTRACT

This study aims to examine the information about The determinants of Board of Commissioners Monitoring Activity in Indonesia. This study was conducted by using Board of Commissioner meeting frequency as dependent variable. The independent variables are Ownership Concentration, Insider Ownership, Board Size, Independent Commissioner Ratio and the Company Size.

This research was conducted by using Multiple Regression as a hypothesis test. Data collection in this study used purposive sampling to non-banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2011. There were 73 companies used as sample in this study.

Result of this study showed that independent variables which are Insider Ownership and Board size negatively affected Board of Commissioner meeting frequency. The other variable, that is size, positively affected the dependent variable.

Key words: Corporate Governance, Board of Commissioner Meeting, Board of Commissioner Monitoring Activity

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi aktivitas pengawasan Dewan Komisaris di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan frekuensi rapat Dewan Komisaris sebagai variabel dependen. Variabel independen yang digunakan yaitu Konsentrasi Kepemilikan, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Dewan Komisaris, Rasio Komisaris Independen dan ukuran perusahaan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *Multiple Regression* sebagai alat uji hipotesis. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* terhadap perusahaan non perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011. Sebanyak 73 perusahaan digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada regresi variabel independen Kepemilikan Manajerial dan Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap frekuensi rapat Dewan Komisaris. Variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap frekuensi rapat Dewan Komisaris.

Kata Kunci : *Corporate Governance, Board of Commissioner Meeting, Board of Commissioner Monitoring Activity*

Motto dan Persembahan

“Don't pray for easy lives, pray to be stronger men”

-John F. Kennedy

“Time you enjoy wasting, was not wasted”

-John Lennon

“God gives every bird his worm but He does not throw it into
the nest”

-Liam Carey

“I don't fear the man who has practiced 10,000 kicks once,
but I fear the man who had practiced one kick 10,000
times.”

-Bruce Lee

Skripsi ini dipersembahkan spesial untuk:

- Bapak dan Ibu serta kakak-kakakku tercinta dan tersayang.
- Ika Permatasari.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Hirobbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Aktivitas Pengawasan Dewan Komisaris Pada Perusahaan *Go Public* di Indonesia” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, baik secara moril maupun materiil kepada :

1. Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, MSi., Akt, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
2. Nur Cahyonowati, S.E., M.Si, Akt. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan serta arahan agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis.
4. Herry Laksito, S.E., M.Adv. Acc., Akt. selaku Dosen Wali, yang telah memberikan pengalaman, motivasi dan ilmu.
5. Seluruh Dosen dan segenap staff karyawan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro atas ilmu dan bantuan yang telah diberikan.

6. Bapak Subaryadi dan Ibu Sumarni tersayang, tercinta, dan terhormat. Terima kasih telah memberikan kasih sayang, motivasi, cerita, serta do'a yang tak pernah selesai dilantunkan.
7. Rainy Wulandari dan Rangga Wiseno. Terima kasih telah menjadi kakak yang baik, selalu memberikan nasihat dan menjadi panutan untuk adiknya.
8. Ika Permatasari yang selalu ada dan memberikan semangatnya. Terima kasih telah memberi dan menjadi motivasi. *Je t'aime*.
9. Mona Ajeng. Terima kasih banyak atas bimbingan dan bantuannya selama ini. Terima kasih juga sudah memperkenalkan temannya.
10. Sigit, Iwak, Anggi, Mona dan Mbah Tia sebagai sahabat yang sangat baik, telah menjadi tempat saya bersandar berbagai masalah. Terima kasih untuk segalanya.
11. Anggota *Ex Lovers Boarding House* Tantra, Galang, Huda, Wahyu, Doa, Theda, Ferry dan Yanto yang diketuai oleh Rijal, juga tak ketinggalan Alfian dan Leo. *Time we enjoy wasting wasn't wasted*.
12. Tim Futsal Akuntansi 2009 Reguler 1. Satu kali juara dan tiga kali *runner up, weren't that bad, were we?*
13. Anggota kontrakan NF Yoga, Fian, Bohi, Yogi dan juga *outsiders* Isam dan Totok yang selalu meramaikan rumah ini.
14. Teman – teman Akuntansi Reguler 1 angkatan 2009 atas kebersamaan dan perjalanannya selama ini.

15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, doa dan dukungannya. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT. Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan wacana bagi semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 24 September 2013

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II TELAAH PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Teori Agensi	12
2.1.2 <i>Good Corporate Governance</i>	15
2.1.3 Konsentrasi Kepemilikan	19
2.1.4 Kepemilikan Manajerial	20
2.1.5 Sistem Dewan	22
2.1.6 Dewan Komisaris.....	24
2.1.7 Komisaris Independen	26
2.2 Penelitian Terdahulu	29
2.3 Kerangka Pemikiran	32
2.4 Hipotesis	36
2.4.1 Konsentrasi Kepemilikan	36
2.4.2 Kepemilikan Manajerial	36

2.4.3	Ukuran Dewan Komisaris	37
2.4.4	Proporsi Komisaris Independen	38
2.4.5	<i>Size</i>	38
BAB III	METODE PENELITIAN	40
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	40
3.1.1	Variabel Independen	40
3.1.2	Variabel Dependen	42
3.2	Populasi dan Sampel	42
3.3	Metode Pengumpulan Data	43
3.4	Metode Analisis	43
3.4.1	Analisis Statistik Deskriptif	44
3.4.2	Uji Asumsi Klasik	44
3.4.3	Uji Hipotesis	47
BAB IV	HASIL DAN ANALISIS	50
4.1	Deskripsi Objek Penelitian	50
4.2	Analisis Data	51
4.2.1	Analisis Statistik Deskriptif	51
4.2.2	Uji Asumsi Klasik	53
4.2.2.1	Uji Normalitas	53
4.2.2.2	Uji Multikolonieritas	55
4.2.2.1	Uji Heterokedastisitas	56
4.2.3	Pengujian Hipotesis	58
4.2.3.1	Uji Koefisien Determinasi	59
4.2.3.2	Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)	59
4.2.3.3	Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)	60
4.3	Interpretasi Hasil	61
4.3.1	Hipotesis 1	61
4.3.2	Hipotesis 2	62
4.3.3	Hipotesis 3	63
4.3.4	Hipotesis 4	64

4.3.5 Hipotesis 5.....	65
BAB V PENUTUP	67
5.1 Simpulan.....	67
5.2 Keterbatasan Penelitian	69
5.3 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN – LAMPIRAN	74

DAFTAR TABEL

TABEL 4.1 Ringkasan Jumlah Sampel Penelitian	51
TABEL 4.2 Statistik Deskriptif Model Regressi	51
TABEL 4.3 Uji Statistik K-S Model Regressi	55
TABEL 4.4 Uji Multikolonieritas Regressi	56
TABEL 4.5 Uji Glejser Model Regressi	57
TABEL 4.6 Ringkasan Hasil Olah Data.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 KerangkaPemikiran I	35
Gambar 4.1 Histogram Model Regressi	54
Gambar 4.2 Normal P-Plot Model Regressi	54
Gambar 4.3 Grafik Plot Model Regressi	57

BAB I

PENDAHULUAN

Bab I menjelaskan tentang alasan mengapa topik faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas pengawasan Dewan Komisaris perlu dibahas. Selain itu juga akan dijelaskan mengenai rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika yang digunakan dalam penelitian ini.

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu kondisi yang digambarkan oleh konsentrasi kepemilikan, pemegang saham yang dominan mungkin saja mencari cara untuk memaksimalkan keperluan mereka sendiri dan mengambil alih kekayaan dari investor-investor lainnya (Shleifer dan Vishny, 1997; Dyck dan Zingales, 2004; Greco, 2011). Investasi yang menguntungkan dapat saja dibatalkan demi keuntungan-keuntungan pribadi (Shleifer dan Wolfenzon, 2002; Greco, 2011). Dalam situasi ini, konflik agensi terdapat diantara pemegang saham orang dalam yang mayoritas dan pemegang saham orang luar yang minoritas.

Para pemilik dengan jumlah saham yang signifikan dapat mengambil tindakan yang agresif terhadap keputusan-keputusan perusahaan. Contoh keputusan perusahaan yang dapat mereka pengaruhi seperti keputusan perusahaan pada pemilihan anggota dewan dan penggantian CEO atau manajemen yang buruk dengan hak suara mereka pada RUPS.

Permasalahan yang dihadapi oleh para pemegang saham orang luar minoritas adalah mereka tidak mempunyai kekuatan pengendalian yang sama

dengan para pemegang saham orang dalam blok besar, karena para pemegang saham orang luar tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan perusahaan. Hal ini menyebabkan para pemegang saham orang dalam dapat mempengaruhi perusahaan dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan mereka sendiri dan merugikan para pemegang saham orang luar. Sementara para pemegang saham orang dalam yang besar menikmati keuntungan-keuntungan dari pengendalian pribadi, para pemegang saham orang luar hanya bertumpu pada aktivitas pengawasan *Board of Directors* (Fama dan Jensen, 1993; Shleifer dan Vishny, 1997; Dyck dan Zingales, 2004).

Masalah lainnya yang dihadapi oleh para pemegang saham orang luar adalah informasi yang asimetris. Terdapat perbedaan informasi yang didapat oleh para pemegang saham orang dalam dengan para pemegang saham orang luar. Tentunya para pemegang saham orang dalam mempunyai informasi yang lebih lengkap mengenai perusahaan dibandingkan dengan para pemegang saham orang luar. Pada akhirnya hal ini dapat mempengaruhi keputusan investasi para pemegang saham.

Latar belakang permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini adalah teori agensi, dimana para pemegang saham orang dalam mempunyai informasi yang lebih lengkap mengenai perusahaan dan mampu mengendalikan serta mempengaruhi keputusan-keputusan yang akan diambil oleh perusahaan dibandingkan dengan para pemegang saham orang luar. Penelitian ini dilakukan dalam latar agensi yang dicirikan melalui pengendalian para pemegang saham yang besar.

Menurut Claessen, Djankov dan Lang (dikutip oleh Tim Corporate Governance BPKP, 2002) di negara-negara Asia Timur, termasuk Indonesia, pengendalian oleh keluarga tercermin dengan lebih besarnya proporsi hak suara mereka dibandingkan dengan proporsi hak dividennya. Satu penelitian pernah menunjukkan bahwa 67,3% perusahaan yang telah terdaftar secara publik dipegang oleh keluarga (Kurniawan dan Indriantoro, 2000). Di negara ini permasalahan agensi tidak muncul diantara para pemilik dengan manajer, tetapi mungkin diantara para pemegang saham dengan pengawasan yang kuat dan pemilik minoritas yang lemah (Lukviarman, 2004).

Good Corporate Governance muncul sebagai suatu standar bagi perusahaan untuk dapat melindungi para pemegang sahamnya. Salah satu komponen penting GCG adalah Dewan Komisaris. Dewan Komisaris mempunyai peran penting dalam implementasi GCG karena Dewan Komisaris bertugas untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas dalam *corporate governance*.

Dewan Komisaris hadir sebagai wakil dari investor-investor untuk menjaga kepentingan dari investor tersebut. Secara garis besar Dewan Komisaris bertugas mengawasi aktivitas dari perusahaan agar berjalan dengan semestinya. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris membentuk komite-komite. Salah satu komite yang digunakan dalam mengawasi perusahaan adalah Komite Audit.

Dewan Komisaris bersama dengan alat bantu, Komite Audit, berperan penting dalam mengawasi perusahaan untuk kepentingan para investor. Dengan kemunculan Dewan Komisaris sebagai wakil dari investor dan Komite Audit sebagai alat bantu Dewan Komisaris, maka muncul ketertarikan dari para investor terhadap aktivitas pengawasan Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Carcello, *et al.*, (2002) menyatakan bahwa tingkat kerajinan pada aktivitas pengawasan seharusnya diukur oleh jumlah dari rapat yang diadakan dan perilaku anggota-anggota individu sebelum, sesaat dan setelah rapat dilakukan. Sementara tingkat kerajinan aktivitas pengawasan menganut beberapa komponen, jumlah rapat Komite Audit per tahun digunakan pada umumnya sebagai wakil yang diterima secara luas untuk aktivitas pengawasan Komite Audit karena menyajikan sinyal terkait usaha dari Komite Audit dan unsur-unsurnya (DeZoort, *et al.*, 2002; Mendez dan Garcia, 2007; Raghunandan dan Rama, 2007; Sharma, *et al.*, 2009; Barua, *et al.*, 2010 dan Greco, 2011).

Frekuensi rapat sering dianggap dalam kepustakaan sebagai wakil untuk tingkat aktivitas pengawasan yang diserahkan (Collier dan Gregory, 1999; Vafeas, 1999; Laksana, 2008; Sharma, *et al.*, 2009). Penelitian sebelumnya menghubungkan frekuensi rapat dengan beberapa keuntungan untuk para pemegang saham (Carcello, *et al.*, 2002 dan Laksana, 2008).

Menurut pendapat Lipton dan Lorsch (1992) serta Yatim, *et al.* (2006) Dewan Komisaris yang sering bertemu akan melaksanakan kewajibannya dengan rajin yang dapat bermanfaat untuk pemangku kepentingan. Rapat Dewan Komisaris merupakan media komunikasi diantara anggotanya sebagai proses

aktivitas pengawasan terhadap manajemen. Dapat dikatakan bahwa semakin sering frekuensi rapat dilaksanakan maka semakin banyak dan cepat Dewan Komisaris mendapatkan informasi perkembangan perusahaan. Melalui rapat, Dewan Komisaris berunding dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang didapat.

Berdasarkan hasil penelitian Xie, *et al.* semakin sering Dewan Komisaris mengadakan rapat, akrual kelolaan perusahaan akan semakin mengecil (dikutip oleh Waryanto, 2010). Dengan kata lain, semakin sering frekuensi rapat Dewan Komisaris, fungsi pengawasan Dewan Komisaris terhadap manajemen akan efektif. Oleh karena itu, frekuensi rapat digunakan sebagai proksi dari aktivitas pengawasan Dewan Komisaris pada penelitian ini.

Beberapa studi mengarahkan secara langsung faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi rapat, dan kebanyakan dari studi tersebut hanya menghubungkan dengan aktivitas Komite Audit (Vafeas, 1999; Mendez dan Garcia, 2007; Raghundanan dan Rama, 2007 dan Sharma, *et al.*, 2009). Pada penelitian ini akan mencoba menjabarkan faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi rapat Dewan Komisaris. Hal tersebut didasarkan dengan penerapan GCG yang dipengaruhi oleh dua peranan penting yaitu Dewan Komisaris dan Komite Audit. Akan tetapi Komite Audit bagian dari Dewan Komisaris sehingga Komite Audit tidak memiliki otoritas pengambil keputusan. Komite Audit hanya dapat memberikan informasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai hasil temuan dari aktivitas pengawasannya.

Penelitian ini menghubungkan faktor-faktor yang ada hanya dengan aktivitas pengawasan Dewan Komisaris. Hal ini dikarenakan ruang lingkup aktivitas pengawasan Komite Audit lebih spesifik kepada laporan keuangan dan pengendalian internal, berbeda dengan Dewan Komisaris yang memiliki ruang lingkup yang besar termasuk mengawasi pelaksanaan strategi perusahaan, menilai dan mengambil keputusan mengenai kinerja direksi. Penelitian ini menguji frekuensi rapat Dewan Komisaris karena ruang lingkup aktivitas pengawasan Dewan Komisaris yang luas berbeda dengan Komite Audit.

Penelitian ini dibuat mengacu pada penelitian serupa yang dilakukan oleh Greco (2011) dalam lingkup di Italia. Penelitian tersebut menguji hubungan antara struktur kepemilikan dan karakteristik Dewan Komisaris dengan tingkat aktivitas dari Dewan Komisaris dan Komite Audit. Struktur kepemilikan terdiri dari variabel independen konsentrasi kepemilikan dan kepemilikan manajerial (*Insider Ownership*). Karakteristik Dewan Komisaris terdiri dari variabel ukuran Dewan Komisaris, proporsi direksi independen, CEO duality, dan kehadiran komisaris independen sebagai *chairman*. Terdapat juga variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan, leverage, umur perusahaan sejak terdaftar di bursa efek dan ROA. Pada penelitian ini, perusahaan perbankan tidak termasuk kedalam sampel penelitian karena memiliki struktur GCG yang berbeda dengan perusahaan pada umumnya.

Berbeda dengan penelitian Greco (2011), penelitian ini hanya menguji frekuensi rapat dari Dewan Komisaris. Hal ini dilakukan karena ruang lingkup aktivitas pengawasan Dewan Komisaris yang lebih luas dibanding Komite Audit.

Penelitian ini menggunakan kembali variable-variable independen dan variabel *size* dari penelitian yang dilakukan Greco (2011) kecuali *CEO duality*. Hal tersebut dikarenakan Indonesia menganut *two-tier board system* dimana Dewan Komisaris tidak dapat bertindak selaku Dewan Direksi juga, sehingga variable tersebut tidak dapat digunakan. Hal ini lah yang memotivasi penulis untuk melakukan penelitian yang mirip dengan Greco tetapi dengan ruang lingkup perusahaan-perusahaan di Indonesia yang terdaftar di BEI pada akhir tahun 2011. Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini diberi judul “**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Aktivitas Pengawasan Dewan Komisaris Pada Perusahaan *Go Public* di Indonesia**”.

1.2. Rumusan Masalah

Perbedaan informasi asimetris antara pemegang saham orang dalam blok besar dengan pemegang saham orang luar minoritas menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi. Perbedaan informasi ini tidak dapat dihindari karena pemegang saham orang dalam yang berinteraksi secara langsung dengan perusahaan sudah pasti mempunyai informasi yang lebih lengkap. Perbedaan informasi ini dapat mempengaruhi keputusan investasi yang akan diambil oleh para investor.

Permasalahan berikutnya muncul ketika para pemegang saham orang dalam blok besar mempunyai wewenang mengawasi dan mengendalikan serta mempengaruhi pengambilan keputusan oleh perusahaan lebih besar dibandingkan para pemegang luar minoritas. Para pemegang saham orang dalam blok besar akan mempunyai kecenderungan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan

perusahaan untuk keputusan yang lebih menguntungkan mereka dibandingkan investor lainnya melalui RUPS. Keputusan-keputusan perusahaan akan dapat cenderung menguntungkan para pemegang saham orang dalam blok besar karena mereka adalah investor utama dari perusahaan.

Permasalahan-permasalahan tersebut membuat para pemegang saham orang luar mendapatkan perlakuan yang berbeda. Pemegang saham orang luar akan mendapatkan informasi yang lebih sedikit dan juga mempunyai pengendalian serta pengawasan terhadap perusahaan yang minim. Mereka hanya mampu mengandalkan aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dalam mengawasi perusahaan. Frekuensi rapat dianggap sebagai proksi yang mampu mengukur aktivitas pengawasan Dewan Komisaris tersebut. Maka dari itu muncul ketertarikan dari investor orang luar yang minoritas terhadap aktivitas pengawasan yang diwakilkan oleh frekuensi rapat anggota Dewan Komisaris.

Ownership concentration dan *insider ownership* dianggap mempunyai pengaruh terhadap aktivitas pengawasan Dewan Komisaris. Dimana sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, kepemilikan saham dalam jumlah yang besar oleh orang dalam perusahaan akan mendapatkan pengawasan secara pribadi dan mempengaruhi pengambilan keputusan. Selanjutnya perumusan masalah akan dirumuskan kedalam beberapa pertanyaan berikut :

1. Apakah Konsentrasi Kepemilikan berpengaruh negatif terhadap aktivitas pengawasan Dewan Komisaris?

2. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap aktivitas pengawasan Dewan Komisaris?
3. Apakah ukuran Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap aktivitas pengawasan Dewan Komisaris?
4. Apakah proporsi dari Komisaris Independen dalam Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap aktivitas pengawasan Dewan Komisaris?
5. Apakah *size* perusahaan berpengaruh positif terhadap aktivitas pengawasan Dewan Komisaris?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan guna menjawab beberapa pertanyaan penelitian (*research question*) dalam rumusan masalah yang dijabarkan. Beberapa tujuan yang terkait dengan pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Memberikan bukti empiris tentang pengaruh Konsentrasi Kepemilikan terhadap aktivitas pengawasan Dewan Komisaris.
2. Memberikan bukti empiris tentang pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap aktivitas pengawasan Dewan Komisaris.
3. Memberikan bukti empiris tentang pengaruh ukuran Dewan Komisaris terhadap aktivitas pengawasan Dewan Komisaris.
4. Memberikan bukti empiris tentang pengaruh proporsi Komisaris Independen dalam Dewan Komisaris terhadap aktivitas pengawasan Dewan Komisaris.
5. Memberikan bukti empiris tentang pengaruh *size* perusahaan terhadap aktivitas pengawasan Dewan Komisaris.

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kontribusi sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan membuat literatur akuntansi semakin bertambah khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas pengawasan oleh Dewan Komisaris pada perusahaan *go public* di Indonesia serta penerapan *Good Corporate Governance*.
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi pembaca mengenai keberadaan faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas pengawasan oleh Dewan Komisaris pada perusahaan *go public* di Indonesia.
3. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi para investor dan pemangku kepentingan lainnya untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas pengawasan oleh Dewan Komisaris pada perusahaan *go public* di Indonesia.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu pola dalam penyusunan karya ilmiah untuk memperoleh gambaran secara garis besar dari bab pertama hingga bab terakhir. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian.

Penelitian ini terdiri dari lima bab, sebagai berikut:

1. Bab I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian , serta sistematika penulisan.

2. Bab II : Telaah Pustaka

Bab ini mengemukakan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis yang diusulkan.

3. Bab III : Metode Penelitian

Bab ini akan menjelaskan berbagai variabel penelitian dan definisi operasional dari masing-masing variabel tersebut, penentuan sampel, jenis dan sumber data, serta metode analisis yang digunakan.

4. Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini akan menjelaskan deksripsi uji penelitian, analisis data dan pembahasan yang didasarkan atas hasil penelitian data.

5. Bab V : Penutup

Bab ini akan menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

BAB II menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan pada penelitian yang dilakukan dalam analisis faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas pengawasan Dewan Komisaris di Indonesia. Selain itu, akan dijelaskan tentang hasil penelitian – penelitian yang dilakukan sebelumnya yang sejenis dengan penelitian ini. Secara sistematis, BAB II mencakup landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Teori agensi adalah sebuah teori yang menerangkan suatu hubungan keagenan (*agency relationship*) antara agen dan prinsipal. Hubungan keagenan merupakan hubungan antara dua pihak dimana salah satu pihak menjadi agen dan pihak yang lain bertindak sebagai principal (Hendriksen dan Van Breda, 2000). Hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) memperkerjakan orang lain (*Agent*) untuk melakukan suatu kegiatan atas nama prinsipal dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut.

Prinsipal adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki perusahaan dimana seseorang atau sekelompok orang tersebut mendelegasikan wewenangnya kepada pihak lain yang dipekerjakan untuk mereka. Pada dasarnya prinsipal menginginkan perusahaan mereka yang dikelola oleh agen memiliki kinerja yang baik. Akan tetapi, sejak mereka mendelegasikan wewenang kepada

agen, agen tersebut yang mengelola perusahaan. Konsekuensinya prinsipal mendapatkan informasi hanya melalui laporan keuangan perusahaan saja.

Agen adalah seseorang atau sekelompok orang yang dipekerjakan dan diberikan wewenang oleh prinsipal untuk mengelola perusahaan prinsipal. Peran agen adalah menjalankan kepentingan manajemen perusahaan. Dalam praktiknya kinerja agen mengenai perusahaan akan dievaluasi oleh prinsipal. Agen akan mendapat kompensasi sesuai kontrak apabila menunjukkan kinerja yang memuaskan prinsipal. Hal ini membuat agen berfokus kepada kinerjanya.

Agen akan cenderung berusaha untuk bisa mendapatkan kompensasi yang disepakati dikontrak. Dengan demikian apabila pada kenyataannya kinerja agen kurang memuaskan, agen akan berusaha merekayasa laporan kinerja yang tersaji ke dalam laporan keuangan perusahaan agar kinerja agen terlihat bagus sehingga agen bisa mendapatkan kompensasi. Sementara itu laporan keuangan yang direkayasa tidak bisa menggambarkan kinerja perusahaan yang sebenarnya. Hal ini lah yang membuat perbedaan informasi yang diterima oleh prinsipal dengan yang dimiliki agen. Perbedaan informasi ini disebut informasi asimetris.

Dalam teori agensi, terdapat tiga asumsi sifat dasar manusia yang digunakan dalam menjelaskan teori agensi oleh Eisenhard (dikutip oleh Isnanta, 2008). Tiga sifat dasar tersebut yaitu :

1. Pada umumnya manusia mementingkan diri sendiri (*self interest*).
2. Manusia memiliki daya pikir yang terbatas mengenai persepsi masa depan (*bounded rationality*).
3. Manusia selalu menghindari resiko (*risk adverse*).

Berdasarkan asumsi sifat dasar diatas, prinsipal dan agen sebagai manusia mungkin saja mengutamakan kepentingan dirinya sendiri. Namun, kepentingan pribadi agen dapat mengabaikan kepentingan prinsipal sebagai pemilik perusahaan. Perbedaan kepentingan ini lah yang disebut dengan *conflict of interest*.

Konflik kepentingan dapat terjadi karena perbedaan tujuan dari masing-masing pihak yang terkait berdasarkan posisi dan kepentingannya terhadap perusahaan (Ibrahim, 2007). Sebagai agen, manajer bertanggung jawab secara moral untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*) seperti apa yang diinginkan oleh pemilik, tetapi di sisi lain manajer juga menginginkan untuk selalu memperoleh kompensasi yang sesuai dengan kontrak. Menurut Ali (dikutip oleh Isnanta, 2008) mengungkapkan bahwa terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang mereka inginkan.

Konflik yang terjadi antara prinsipal dan agen yang didasari perbedaan kepentingan disebut juga *agency conflict*. Konflik keagenan adalah konflik dimana manajer akan cenderung bertindak untuk memaksimalkan kepuasannya sendiri, sementara prinsipal atau para pemegang saham menginginkan laba perusahaan yang optimal. Konflik ini mengakibatkan manajer dapat bertindak berlawanan dengan keinginan pemilik. Konflik inilah yang menjadi permasalahan dalam hubungan keagenan. Di dalam teori agensi terdapat dua macam permasalahan agensi :

1. *Moral Hazard*

Permasalahan yang timbul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja.

2. *Adverse Selection*

Suatu keadaan dimana *principal* tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen didasarkan sesuai atas informasi yang diperolehnya atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas.

Permasalahan yang terjadi akibat konflik keagenan dan informasi asimetris menimbulkan biaya agensi bagi perusahaan. Menurut Jensen dan Meckling terdapat tiga jenis biaya keagenan yaitu :

1. Biaya Pengawasan (*monitoring cost*), adalah biaya yang dikeluarkan karena melakukan pengawasan terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh agen.
2. Biaya Bonding (*bonding cost*), adalah biaya yang menjamin bahwa agen tidak akan bertindak sesuatu yang merugikan *principal*. Dalam pengertian lainnya *principal* akan memberikan kompensasi jika agen benar-benar melakukan tindakan tersebut.
3. Biaya kerugian residual (*residual loss*), merupakan nilai uang yang ekuivalen dengan pengurangan kemakmuran yang dialami oleh *principal* akibat dari perbedaan kepentingan dengan agen.

2.1.2 *Good Corporate Governance*

Menurut Daniri (2005) telah banyak perusahaan yang mengalami kegagalan karena tidak mengimplementasikan *good corporate governance*.

Perusahaan-perusahaan tersebut hanya memperdulikan laba mereka tanpa memperhatikan kepentingan para pemegang saham. Para pemegang saham selaku pemilik perusahaan seharusnya dilindungi oleh perusahaan. Perlindungan tersebut tentunya tanpa adanya diskriminasi perlakuan dari perusahaan terhadap para pemegang sahamnya.

Beberapa tahun belakangan ini pelaksanaan *good corporate governance* menjadi perhatian khusus bagi perusahaan yang ingin menjaga keberlangsungan usahanya. Pelaksanaan *good corporate governance* diyakini sebagai solusi bagi perusahaan-perusahaan dalam menjalani kegiatan bisnisnya agar terhindar dari kehancuran.

Menurut *The Organisation for economic Co-Operation and Development (OECD)* dalam Tangkilisan (2003) *Good corporate governance* adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. *Good corporate governance* mengatur pembagian tugas, hak, dan kewajiban mereka yang berkepentingan, terhadap perusahaan, termasuk pemegang saham, Dewan Komisaris, direksi dan para pemegang saham lainnya.

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)* (2003) pengertian *corporate governance* adalah Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta pemegang intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Tujuan *corporate governance* adalah menciptakan pertambahan nilai bagi semua pihak pemegang kepentingan.

The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) menyatakan pengertian *corporate governance* adalah sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain.

Dari beberapa pengertian mengenai *good corporate governance* yang telah disampaikan diatas, dapat disimpulkan bahwa *good corporate governance* merupakan suatu kerangka hubungan, struktur, pola dan sistem yang berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar dan undang-undang yang berlaku dengan mempertemukan, menjelaskan, mengarahkan dan mengendalikan hubungan antara para pemegang saham, manajemen, kreditur, pemerintah dan stakeholders lainnya pada hak dan kewajiban masing-masing pihak tersebut. Tujuan dari GCG adalah meningkatkan nilai-nilai jangka panjang yang diinginkan oleh para pemangku kepentingan.

Dalam menerapkan GCG, terdapat beberapa asas yang harus diterapkan oleh perusahaan-perusahaan. Asas-asas tersebut menurut KNKG (2006) adalah :

1. ***Fairness*** (keadilan). Prinsip keadilan dalam GCG diartikan sebagai adanya perlakuan yang setara (*equal*) terhadap semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya (Wardiyasa, 2001).
2. ***Transparancy*** (tranparansi). Transparan secara harfiah adalah jelas, dapat dilihat secara menyeluruh (Collins, 1986). Dengan demikian

transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan perusahaan (Wardiyasa, 2001).

3. **Responsibility** (pertanggungjawaban). Prinsip ini memastikan dipatuhinya peraturan-peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin dipatuhinya nilai-nilai sosial. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawabnya kepada masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.
4. **Accountability** (akuntabilitas). Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta pertanggungjawaban atau keterangan.
5. **Independency** (Independensi). Independensi yang dimaksud adalah suatu keadaan dimana perusahaan terbebas dari pengaruh-pengaruh tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan mekanisme korporasi. Perusahaan disebut independen apabila dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dan Direksi terbebas dari tekanan ataupun intervensi dari pihak manapun termasuk pembuat peraturan (regulator).

2.1.3 Konsentrasi Kepemilikan

Konsentrasi kepemilikan adalah suatu kondisi dimana pemegang saham memiliki jumlah saham yang besar dan total persentase yang para pemegang saham miliki dari saham perusahaan. Para pemegang saham dengan blok besar adalah investor yang memiliki saham setidaknya sebesar 5 persen dari saham perusahaan.

Semakin besar saham yang dimiliki oleh investor maka kepemilikan perusahaan akan terkonsentrasi, dengan saham blok besar yang dimiliki oleh beberapa para pemegang saham, semakin besar pula insentif pemilik perusahaan untuk mengawasi dan mengendalikan tindakan-tindakan manajerial. Insentif para pemegang saham untuk mengawasi perusahaan kecil ketika para pemegang saham hanya memiliki jumlah saham yang kecil pula. Semakin besar saham yang dimiliki oleh pemegang saham, maka semakin besar pula ketertarikan untuk mengawasi perusahaan.

Aktivitas pengawasan terhadap perusahaan penting agar manajemen tidak melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan para pemegang saham. Aktivitas pengawasan biasanya dikerjakan oleh Dewan Komisaris perusahaan, dimana Dewan Komisaris dipilih pemegang saham blok besar melalui RUPS dan ditugaskan untuk melindungi kepentingan para pemegang saham dengan mengawasi manajerial. Karena para pemegang saham blok besar memiliki pengaruh yang lebih besar dalam pemilihan komisaris, komisaris akan lebih memperhatikan kepentingan para pemegang saham blok besar dibandingkan para pemegang saham dengan jumlah yang lebih kecil.

Berbeda dengan investor di luar perusahaan, investor di dalam perusahaan dapat mengawasi dan mengontrol perusahaan secara langsung. Hal ini berdampak semakin besar saham yang dimiliki investor orang dalam maka mereka tidak memiliki insentif dalam membantu perkembangan aktivitas Dewan Komisaris dan Komite Audit karena dapat meningkatkan biaya dalam penggalan keuntungan privat bagi mereka (Leftwich, *et al.*, 1981; Shleifer dan Vishny, 1997).

2.1.4 Kepemilikan Manajerial

Pengertian *insider ownership* menurut Wahidahwati (dikutip oleh Hardiyanti, 2012) adalah pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (Direktur dan Komisaris). Pengertian *insider ownership* lainnya menurut Nizar dan Shahrul (dikutip oleh Hardiyanti, 2012) mengatakan bahwa *Insider ownership* adalah pemegang saham, direksi atau pejabat perseroan yang memiliki proporsi yang signifikan dalam saham perseroan. Insider ownership dikenal juga dengan kepemilikan manajerial. Dalam pengertian yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial merupakan jumlah persentase saham yang signifikan yang dimiliki oleh manajer dan direksi suatu perusahaan, dimana manajer dan direksi ikut aktif dalam pengambilan keputusan perusahaan.

Menurut Leland dan Pyle (dikutip oleh Ekayana, 2007) *Insider ownership* mempunyai keinginan untuk menginvestasikan modalnya ke dalam proyek mereka yang berkualitas dan hal ini dapat mengindikasikan bahwa ekuitas yang dipegang oleh insider dapat bertindak sebagai sinyal nilai perusahaan. Dalam penelitiannya, Hirschey dan Zaima (1989) mengungkapkan bahwa keputusan

menjual perusahaan dengan insider ownership yang lebih besar memperoleh respon investor yang lebih menguntungkan perusahaan dibandingkan perusahaan dengan insider ownership yang lebih rendah.

Di dalam teori agensi terdapat pendapat bahwa kepemilikan oleh manajemen mempunyai dua sisi yang dapat mempengaruhi biaya keagenan (Jensen dan Meckling, 1976; Shleifer dan Vishny, 1997). Di satu sisi, kepemilikan oleh manajemen secara khusus mengurangi biaya agen karena memotivasi manajemen untuk berperilaku seperti pemegang saham. Kepemilikan oleh manajemen dapat menggantikan sebagian mekanisme monitoring (Fama dan French, 2001). Dampaknya kepemilikan oleh manajemen dapat mengurangi biaya keagenan. Hal ini dikarenakan insider juga memiliki saham atas perusahaan sehingga memiliki kepentingan yang sama dengan para pemegang saham lainnya yaitu menginginkan kinerja yang bagus dari perusahaan. Dengan begitu insider akan termotivasi dalam bekerja untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

Akan tetapi, semakin tinggi saham yang dimiliki oleh insider akan membuat insider memiliki kontrol terhadap perusahaan. Insider sebagai pemegang saham menikmati keuntungan pribadi dari pengawasan langsung terhadap perusahaan. Insider pun juga memiliki lebih banyak informasi terkait perusahaan dibanding outsider. Dengan keuntungan-keuntungan yang dimiliki oleh insider, mereka dapat melakukan tindakan oportunistik yang merugikan para pemegang saham lainnya. Dampaknya kepemilikan oleh manajemen yang begitu tinggi dapat lebih mementingkan kepentingan manajemen dan direksi sehingga meningkatkan biaya keagenan. Di pasar modal yang relatif kecil, kepemilikan manajemen yang

tinggi dapat mengakibatkan salah pelaporan keuangan dan pengambilalihan pemegang saham minoritas (Fan dan Wong, 2002).

2.1.5 Sistem Dewan

Didalam struktur *Corporate Governance* terdapat dua sistem dewan yang berlaku umum di dunia yaitu *the anglo-saxon system* dan *the continental europe system*. *The anglo-saxon system* menyatukan peran Dewan Komisaris dengan Dewan Direksi dalam satu wadah yang disebut *Board of Director* (BOD) sedangkan *the continental europe system* peran Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dipisah secara jelas.

2.1.5.1 *The Anglo-Saxon System*

Model *anglo-saxon system* disebut juga *one board system*. Hal ini dikarenakan peran Dewan Komisaris sebagai pengawas dan Dewan Direksi sebagai pelaksana dijadikan kedalam satu badan yaitu *board of director*. Struktur *governance* dalam model ini terdiri dari RUPS, *board of director*, serta *executive managers* yang dipimpin oleh CEO.

Dalam *one board system* dapat terjadi *CEO duality*. *CEO duality* adalah suatu keadaan dimana CEO juga menjabat sebagai *chairman* dewan dalam satu perusahaan. Hal ini menimbulkan tugas pengendalian keputusan dari dewan untuk mengawasi kedisiplinan manajemen melemah ketika posisi CEO dan ketua dewan disatukan (Mulick, 1993). Seperti apa yang dikatakan oleh Kesner dan Dalton (dikutip oleh Rechner dan Dalton, 1989:141): “Potensi ancaman untuk independensi dewan adalah peran ganda CEO sebagai ketua dewan, ketua top manajerial di dalam perusahaan sekaligus juga sebagai ketua dewan yang

diberikan hak untuk memonitor dan mengevaluasi ketua top manajerial. Sangat masuk akal bila dikatakan sebagai ketua dewan, CEO akan mencoba mempengaruhi anggota dewan lainnya”.

2.1.5.2 *The Continental Europe System*

Struktur *corporate governance* model ini terdiri dari RUPS, dewan pengawas (supervisory board), dewan pelaksana (executive board) dan manajer eksekutif. Di dalam *two board system*, peran dari Dewan Komisaris dengan Dewan Direksi dipisahkan. Dewan Komisaris sebagai wakil dari pemegang saham mengawasi kinerja Dewan Direksi yang mengelola perusahaan.

Pemisahan secara fisik menjadi dua badan dewan ini tidak hanya menghasilkan dua fungsi manajemen dan pengawasan saja, tetapi juga menjamin bahwa seseorang tidak diminta atau diharapkan untuk melakukan peran keduanya. Dengan pemisahan peran Dewan Direksi dan dewan supervisor maka dalam *two-tier system* tidak mungkin *CEO duality* dapat diaplikasikan.

Struktur tertinggi dalam model ini adalah RUPS yang dapat mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris. Namun, Dewan Komisaris membawahi langsung Dewan Direksi sehingga Dewan Komisaris memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi.

2.1.5.3 Sistem Dewan di Indonesia

Kepengurusan perseroan terbatas di Indonesia menganut *two-board system* dimana terdapat Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing (KNKG, 2006). Akan tetapi, penerapan *two-board system* di Indonesia berbeda dengan konsep *the continental*

europe system dimana di Indonesia wewenang pengangkatan dan pemberhentian Dewan Direksi dimiliki oleh RUPS, bukan Dewan Komisaris.

Di Indonesia, seluruh perusahaan diwajibkan untuk menerapkan sistem dewan dua tingkat (*two-board system*). Terdapat dua dewan yaitu Dewan Komisaris sebagai pengawas dan Dewan Direksi sebagai pelaksana. Hal ini tentunya berdampak tidak adanya CEO duality yang diterapkan di Indonesia.

2.1.6 Dewan Komisaris

Para pemegang saham tidak dapat mengawasi dan mengontrol perusahaan secara langsung. Dewan Komisaris muncul sebagai wali dari para pemegang saham tersebut untuk melindungi kepentingan pemegang saham. Para pemegang saham menyerahkan aktivitas pengawasan kepada Dewan Komisaris untuk mengawasi perusahaan dalam beroperasi. Dalam pengimplementasian GCG oleh perusahaan, Dewan Komisaris mempunyai peran yang penting. Hal ini dikarenakan Dewan Komisaris yang bertugas untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam menjalankan perusahaan serta mengharuskan terlaksananya akuntabilitas oleh perusahaan. Agar GCG dapat diimplementasikan dengan baik, perusahaan memerlukan Dewan Komisaris yang memiliki integritas, kemampuan, tidak cacat hukum juga independen, serta tidak memiliki hubungan bisnis dengan pemegang saham mayoritas dan Dewan Direksi.

Tugas dari Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan memberikan nasihat kepada direksi. Dewan Komisaris tidak boleh mengambil keputusan operasional perusahaan. Dewan Komisaris hanya sebatas mengawasi dan

memberikan nasihat kepada Dewan Direksi berdasarkan dengan anggaran dasar perusahaan. Pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris kepada Dewan Direksi bertujuan untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan.

Berdasarkan pedoman *Good Corporate Governance* jumlah anggota Dewan Komisaris tidak diatur. Jumlah anggota Dewan Komisaris disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Meskipun jumlah anggota Dewan Komisaris tidak ditentukan, tetapi pedoman *Good Corporate Governance* mengaruskan minimal 30 persen anggota Dewan Komisaris adalah komisaris independen.

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan saat RUPS. Struktur Dewan Komisaris seperti direksi, bisa terdiri dari satu orang atau lebih. Dewan Komisaris yang terdiri lebih dari satu orang anggota bersifat majelis. Dewan Komisaris yang bersifat majelis, setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri atau sesukanya, melainkan harus berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Di Indonesia, regulasi yang mengatur pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris pada BUMN diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER- 04/MBU/2009 tentang pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Syarat umum untuk bisa menjadi anggota Dewan Komisaris yaitu cakap melakukan perbuatan hukum. Syarat khusus yang ada pada Perseroan di Indonesia yaitu calon anggota Dewan Komisaris tidak dapat diangkat apabila dalam jangka waktu 5 tahun sebelum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris pernah

dinyatakan pailit, atau menjadi anggota direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit. Pantangan lainnya adalah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Semenjak Dewan Komisaris sebagai wali dari para pemegang saham dan pengawas perusahaan, pemegang saham tertarik untuk melakukan pengawasan melalui aktivitas yang dilakukan oleh Dewan Komisaris. Pemegang saham ingin melihat tingkat kerajinan dari Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan. Proksi yang cocok untuk melihat tingkat kerajinan aktivitas pengawasan Dewan Komisaris adalah frekuensi rapat Dewan Komisaris.

2.1.7 Komisaris Independen

Dalam struktur kepengurusan perusahaan di Indonesia memakai two-tier board system sehingga terdapat dua posisi Direksi dan Komisaris. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 92 ayat (1) menyebutkan bahwa Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Demikian pula dijelaskan dalam pasal 108 ayat (1) yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan kepengurusan, jalannya kepengurusan pada umumnya baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi.

Dalam perusahaan go public, pemegang saham dapat dibedakan menjadi pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Komisaris muncul sebagai wakil dari pemegang saham untuk melindungi kepentingannya. Akan

tetapi komisaris saja dinilai tidak cukup untuk melindungi pemegang saham minoritas. Padahal, pemegang saham minoritas walaupun memiliki porsi kepemilikan yang kecil, tetapi secara kumulatif porsi kepemilikan mereka besar. Maka hadir pula komisaris independen untuk melindungi para pemegang saham minoritas.

Komisaris luar (komisaris independen) adalah anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan pegawai atau orang yang berurusan langsung dengan organisasi tersebut, dan tidak mewakili pemegang saham. Komisaris independen bukan wakil dari pemegang saham minoritas, tetapi kehadirannya dapat melindungi ketertarikan dari pemegang saham minoritas.

Independent non-executive director (komisaris independen) dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijaksanaan direksi serta memberikan nasihat kepada direksi (Fama dan Jensen, 1983). Komisaris Independen memiliki dua karakteristik yang memungkinkan mereka memenuhi fungsi monitoring mereka (Charlie, *et al.*, 2000). Karakteristik yang pertama adalah independensi yang mereka miliki (Cadbury, 1992), dan yang kedua adalah keinginan komisaris independen untuk menjaga reputasi mereka dalam pasar tenaga kerja eksternal (Fama dan Jensen, 1983)

Komisaris independen diharapkan dapat mempermudah pelaksanaan pertanggungjawaban Dewan Komisaris yang meliputi penyusunan tujuan strategi perusahaan, penyediaan kepemimpinan yang berpengaruh, pengawasan manajemen atas bisnis yang berjalan dan memastikan perusahaan menjalankan

Good Corporate Governance sebagaimana mestinya serta melaporkan hasilnya kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya dalam masa kepengurusannya (Cadbury, 1992). Menurut Sekara Mayang Sari (2003) komisaris independen juga bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait.

Dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.5 disebutkan syarat-syarat menjadi Komisaris Independen, yaitu:

- a. Berasal dari luar emiten atau perusahaan publik;
- b. Bukan merupakan orang yang bekerja pada emiten dan perusahaan publik dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan serta mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik dalam waktu enam bulan terakhir;
- c. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik;
- d. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, Komisaris, Direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik;
- e. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik, dan

- f. Tidak mempunyai hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

2.2. Penelitian Terdahulu

Komite Audit berperan membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi perusahaan untuk kepentingan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan begitu, para shareholder dan stakeholder tertarik untuk mengawasi kinerja dari Komite Audit. Para pemegang saham meyakini peran Komite Audit akan semakin efektif apabila Komite Audit rajin menjalankan perannya.

Kerajinan dari Komite Audit dianggap pengukuran yang paling penting dalam mengukur keefektifan Komite Audit (Kalbers dan Fogarty, 1993; Wilekens, *et al.*, 2004; Collier dan Zaman, 2005; Mendez dan Garcia, 2007; Turley dan Zaman, 2007; Sarma, *et al.*, 2009; Greco, 2011; Feng Yin, *et al.*, 2011). Komite Audit yang efektif dapat membantu transparansi dalam pasar sekuritas dan melindungi ketertarikan dari pemegang saham lebih baik serta dapat meningkatkan nilai perusahaan (McMullen dan Raghunandan, 1996; PwC, 1999; DeZoort, *et al.*, 2002).

Beberapa penelitian yang dilakukan hanya mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi rapat Komite Audit saja (Menon dan Williams, 1994; Vafeas, 1999; Mendez dan Garcia, 2007; Raghundanan dan Rama, 2007; Sharma, *et al.*, 2009; Greco, 2011; Al-Najjar, 2011; Feng Yin, *et al.*, 2011). Hanya sedikit penelitian membahas aktivitas dewan dengan proksi frekuensi rapat

dewan (Al-Najjar, 2011). Padahal Dewan Komisaris juga memainkan peran penting dalam *good corporate governance*.

Dewan dapat dilihat sebagai alat yang proaktif dalam meningkatkan corporate governance (Vafeas, 1999). Conger, *et al.* (1998) menyatakan bahwa keefektifan dari dewan meningkat dengan frekuensi rapat. Menurut Vafeas (1999) semakin banyak frekuensi rapat dewan mengarahkan para manajer untuk bekerja sejalan dengan ketertarikan dari para pemegang saham.

Feng Yin, *et al.* (2011) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi rapat Komite Audit di China. Hampir serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Greco (2011) di Italia, Feng Yin, *et al.* (2011) juga memakai latar struktur kepemilikan dalam penelitiannya. Hanya saja variable independen yang digunakan Feng Yin, *et al.* berbeda dengan penelitian Greco. Variable independen yang digunakan Feng Yin, *et al.* dalam latar struktur kepemilikannya adalah proporsi saham yang dipegang oleh pemegang saham mayoritas dan sifat dasar dari pemegang saham mayoritas apakah dipegang oleh pemerintah atau swasta. Variable independen yang lainnya adalah karakteristik dari komite audit dan dewan serta karakteristik keuangan perusahaan dan eksternal auditor.

Sampel yang dipakai dalam penelitian Feng Yin, *et al.* terdapat 912 perusahaan di Cina dalam jangka waktu 3 tahun. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi. Hasil dari penelitiannya adalah frekuensi rapat Komite Audit berpengaruh negatif dengan proporsi saham yang dimiliki oleh pemegang saham mayoritas dan frekuensi rapat Komite Audit lebih sedikit dalam perusahaan yang dimiliki pemerintah dibandingkan dengan perusahaan dimiliki privat.

Ukuran perusahaan dan Komite Audit berhubungan positif dengan frekuensi rapat Komite Audit. Terdapat pengaruh negatif dari proporsi direktur independen dalam *board of directors* terhadap frekuensi rapat Komite Audit.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Sutaryo, *et al.* (2010) di Indonesia dengan sampel sebanyak 151 perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2009. Variable independen yang digunakan antara lain ukuran perusahaan, leverage, pertumbuhan perusahaan, rugi perusahaan, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran Komite Audit, keahlian akuntansi Komite Audit, independensi Komite Audit, ukuran Dewan Komisaris, independensi Dewan Komisaris dan tipe industri. Pengujian yang dilakukan menggunakan multiple regresi.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Sutaryo, *et al.* (2010) menunjukkan bahwa karakteristik keuangan perusahaan, struktur kepemilikan dan tipe industri berpengaruh terhadap frekuensi rapat Komite Audit. Akan tetapi penelitian ini gagal membuktikan pengaruh dari karakteristik Komite Audit dan dewan terhadap frekuensi rapat Komite Audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Al-Najjar (2011) di Inggris periode waktu 2003-2008 dengan total sampel 584 perusahaan meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi rapat dewan. Penelitian ini menggunakan Multinomial Logistic modelling dan Conditional Logistic modelling. Variable independen yang digunakan antara lain direktur independen dalam dewan, frekuensi rapat Komite Audit, ukuran dewan, leverage, CEO duality, free cash flow dan Tobin's Q.

Hasil dari penelitian Al-Najjar (2011) membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif dari struktur dan ukuran dewan terhadap frekuensi rapat dewan. Ditemukan pengaruh negatif dari tingkat kerajinan Komite Audit terhadap frekuensi rapat dewan. Hasil juga menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, leverage, free cash flow dan Tobin's Q mempunyai dampak terhadap frekuensi rapat Dewan Komisaris.

Penelitian yang dilakukan Greco (2011) berbeda dari yang lain. Greco meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi rapat dewan dan Komite Audit secara bersamaan di Italia tahun 2007. Greco menggunakan negative binomial regression. Penelitiannya dilakukan dengan latar struktur kepemilikan dan karakteristik dari dewan. Variable independennya antara lain kepemilikan yang terkonsentrasi, insider ownership, ukuran dewan, CEO duality, proporsi direktur independen dan kehadiran direktur independen sebagai chairman.

Penelitian yang dilakukan Greco di Italia mengungkapkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap frekuensi rapat baik dewan maupun Komite Audit sedangkan proporsi direktur independen dalam dewan memiliki dampak positif. Penemuan lainnya adalah Komite Audit lebih aktif di perusahaan yang lebih besar.

2.3. Kerangka Pemikiran

Permasalahan yang dipaparkan pada penelitian ini adalah dimana para pemegang saham orang dalam dengan blok besar mempunyai pengendalian dan informasi yang lebih besar dibandingkan dengan pemegang saham orang luar

minoritas. Hal ini menyebabkan terjadinya informasi asimetris diantara pemegang saham orang dalam dengan pemegang saham orang luar perusahaan.

Namun kemunculan GCG berfungsi untuk melindungi para pemegang saham. Dengan asas transparansi dan keadilan, menuntut perusahaan untuk memperlakukan semua investornya dengan adil serta mempublikasikan kegiatan perusahaan kepada investor.

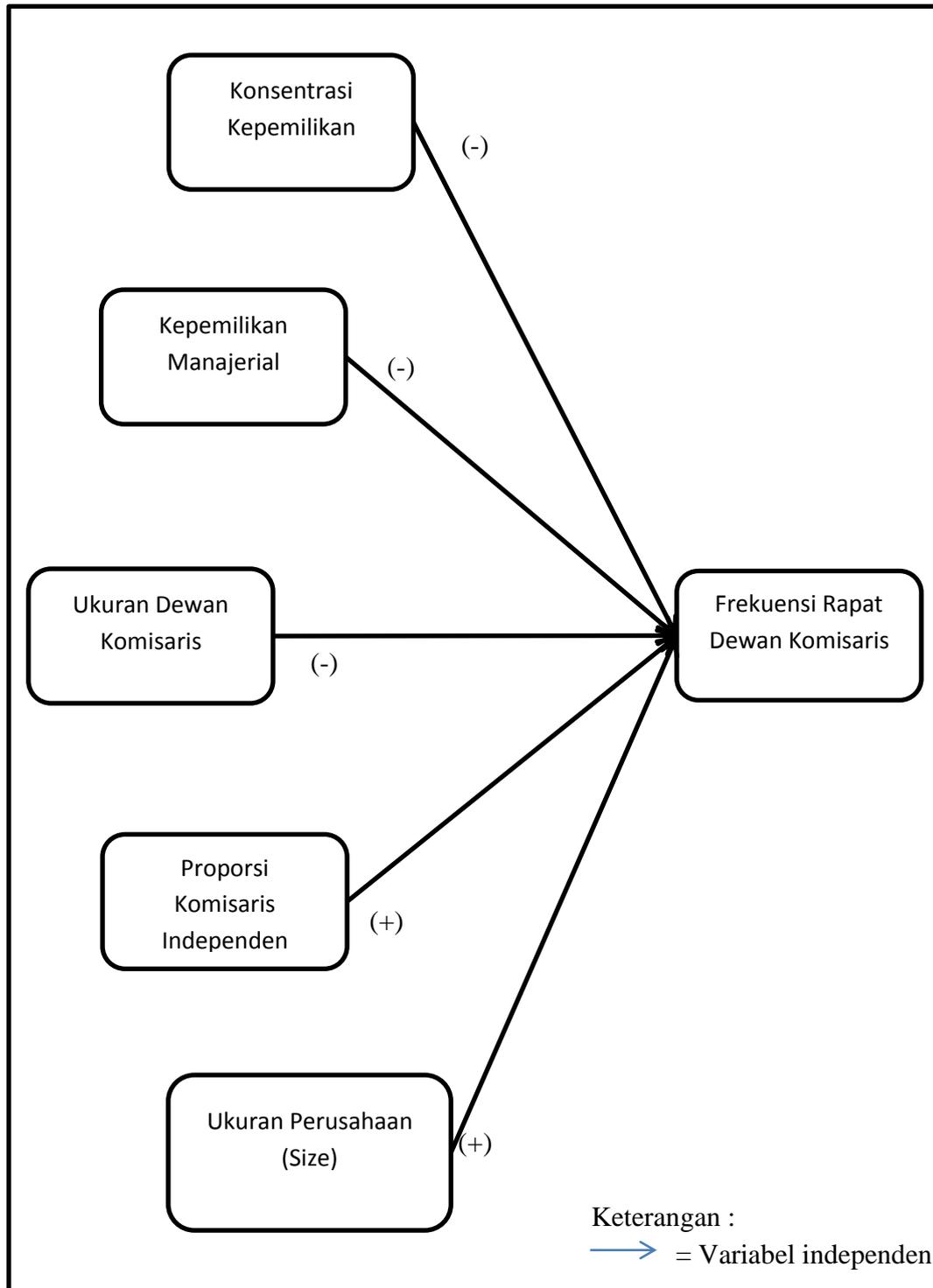
Sementara para pemegang saham orang dalam menikmati keuntungan mereka dalam mengendalikan perusahaan secara pribadi, para pemegang saham orang luar hanya mengandalkan pada aktivitas pengawasan Dewan Komisaris (Fama dan Jensen, 1983; Shleifer dan Vishny, 1997; Dyck dan Zingales, 2004). Semenjak pengawasan yang dapat dilakukan oleh para pemegang saham orang luar hanya melalui aktivitas pengawasan Dewan Komisaris, maka menarik untuk meneliti aktivitas yang dilakukan oleh Dewan Komisaris. Frekuensi rapat bisa menjadi proksi dari waktu yang dimiliki dari para direksi untuk bekerja dan sebagai tingkat dari aktivitas pengawasan yang diberikan (Vafeas, 1999; Carcello, *et al.*, 2002; Laksmana, 2008). Sehingga penelitian ini bermaksud untuk mencari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi frekuensi rapat rapat Dewan Komisaris.

Dalam latar agensi yang dicirikan oleh konsentrasi kepemilikan, para pemegang saham orang dalam yang besar mengambil keuntungan dari keuntungan-keuntungan dalam pengendalian pribadi dan menikmati akses langsung terhadap informasi (Shleifer dan Vishny, 1997; Dyck dan Zingales, 2004). Pengendalian pemegang saham yang dominan tidak mempunyai insentif

untuk membantu perkembangan aktivitas dari dewan dan Komite Audit, semenjak lingkungan insentif pengawasan akan menambah biaya dari penggalan keuntungan pribadi untuk mereka (Leftwich, *et al.*, 1981; Shleifer dan Vishny, 1997).

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran I



2.4. Hipotesis

2.4.1. Konsentrasi Kepemilikan

Pengendalian para pemegang saham yang dominan tidak mempunyai insentif untuk membantu perkembangan dari aktivitas dewan karena lingkungan insentif pengawasan dapat meningkatkan biaya dalam penggalan keuntungan pribadi untuk mereka (Leftwich, *et al.*, 1981; Shleifer dan Vishny, 1997). Dalam latar agensi yang dicirikan konsentrasi kepemilikan, pemegang saham mayoritas mungkin saja memiliki motivasi untuk mengambil alih apa yang menjadi ketertarikan dari minoritas (Feng Yin, *et al.*, 2011). Hasil penelitian sebelumnya yang terkait mengungkapkan bahwa pengendalian para pemegang saham yang besar mempunyai dampak negatif terhadap frekuensi rapat Komite Audit (Mendez dan Garcia, 2007). Sehingga diharapkan pada penelitian konsentrasi kepemilikan mempunyai pengaruh negatif dengan frekuensi rapat Dewan Komisaris.

H1 : *Ceteris Paribus*, kepemilikan yang terkonsentrasi berpengaruh negatif terhadap jumlah rapat Dewan Komisaris.

2.4.2. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial dapat mempunyai dua dampak. Di satu sisi, kepemilikan manajerial dapat menyelaraskan manajemen dan kepentingan dari pemegang saham sehingga mengurangi biaya keagenan (Greco, 2011). Dalam sudut pandang ini, kepemilikan manajerial dapat menggantikan mekanisme pengendalian yang lainnya (Leftwich, *et al.*, 1981; Fama dan Jensen, 1983).

Namun disisi lain, kepemilikan orang dalam yang besar dapat berkubu pada para direksi, oleh karena itu meningkatkan biaya agensi untuk para

pemegang saham (Sharma, *et al.*, 2009, h. 252). Literatur menemukan bukti empiris yang mendukung pandangan ini (Fan dan Wong, 2002; Barclay, *et al.*, 2007). Penelitian sebelumnya memperkirakan efek substitusi antara pemegang saham orang dalam dan aktivitas pengawasan oleh direksi, baik dewan maupun Komite Audit. Pandangan ini didukung oleh penelitian terkait. Pemegang saham orang dalam ditemukan berpengaruh negatif dengan frekuensi rapat dewan (Vafeas, 1999). Formula hipotesis penelitian ini sebagai berikut :

H2 : *Ceteris Paribus*, Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap jumlah rapat Dewan Komisaris.

2.4.3. Ukuran Dewan Komisaris

Menurut Vafeas (1999) sementara mekanisme pengendalian yang komplementer dan substitusi mungkin menjelaskan pecahan dari variasi aktivitas dewan, variabel-variabel mewakili untuk ketidakefisienan dewan yang mungkin menjelaskan pecahan lainnya dari variasi tersebut. Dalam dewan yang besar keuntungan-keuntungan dari kapasitas pengawasan yang ditingkatkan mungkin sebanding dengan permasalahan koordinasi dan pengambilan keputusan yang lebih lambat (Lipton dan Lorsch, 1992; Jensen, 1993). Penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa seiring peningkatan ukuran dewan, inefisiensi dapat mengurangi aktivitas Dewan Komisaris.

H3 : *Ceteris Paribus*, ukuran Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap jumlah rapat Dewan Komisaris.

2.4.4. Proporsi Komisaris Independen

Literatur akademik sangat menyadari bahwa proporsi komisaris independen dalam dewan berkontribusi untuk meningkatkan pengawasan (Carcello, *et al.*, 2002). Carcello, *et al.* (2002) menyatakan bahwa komisaris independen dalam dewan dan Komite Audit mungkin menginginkan pengawasan yang lebih terhadap proses pelaporan keuangan untuk menjaga reputasi mereka dan nilai pasar mereka sebagai ahli keputusan (Leftwich, *et al.*, 1981).

Vafeas (1999) berpendapat bahwa komisaris independen mungkin menginginkan frekuensi rapat dewan yang lebih banyak untuk menambah kemampuan mereka dalam mengawasi manajemen. Menon dan Williams (1994) menemukan, dengan sampel perusahaan US, aktivitas Komite Audit berpengaruh positif dengan proporsi komisaris independen dalam dewan (Menon dan Williams, 1994, h. 133). Dengan begitu diharapkan adanya pengaruh positif antara proporsi komisaris independen dengan aktivitas Dewan Komisaris.

H4 : *Ceteris Paribus*, proporsi Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap jumlah rapat Dewan Komisaris.

2.4.5. Size

Semakin besar perusahaan akan semakin rumit tingkat kompleksitasnya. Perusahaan yang besar berpotensi menciptakan masalah keagenan pada pelaporan keuangan yang lebih besar. Oleh karena itu semakin besar perusahaan maka semakin membutuhkan aktivitas pengawasan lebih besar.

Penelitian Sutaryo, *et al.* (2010), Greco (2011) dan Feng Yin, *et al.* (2011) dapat membuktikan bahwa variabel *size* berpengaruh positif signifikan terhadap

frekuensi rapat baik rapat Dewan Komisaris maupun Komite Audit. Dengan begitu diharapkan *size* mempunyai pengaruh positif terhadap jumlah rapat Dewan Komisaris di Indonesia.

H5 : Ceteris Paribus, *size* berpengaruh positif terhadap jumlah rapat Dewan Komisaris.

BAB III

METODE PENELITIAN

BAB III menjelaskan tentang variable penelitian dan definisi operasional variabel yang digunakan pada penelitian yang dilakukan dalam mencari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi aktivitas pengawasan Dewan Komisaris di Indonesia. Pada bagian ini akan dijelaskan pula tentang populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian adalah karakteristik yang nilai datanya bervariasi dari satu pengukuran ke pengukuran berikut. Untuk menguji hipotesis yang diajukan, variabel yang diteliti dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi variabel independen, variabel dependen dan variabel kontrol.

3.1.1 Variabel Independen

Variabel independen (bebas) adalah variabel yang membantu menjelaskan varians dalam variabel terikat (Sekaran, 2009). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. **Konsentrasi Kepemilikan**

Konsentrasi kepemilikan adalah persentase saham yang dimiliki oleh investor. Pengukuran variabel Konsentrasi Kepemilikan adalah persentase saham terbesar yang dimiliki oleh investor di dalam perusahaan.

2. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan jumlah persentase saham yang signifikan yang dimiliki oleh Dewan Komisaris dan Dewan Direksi suatu perusahaan, dimana mereka ikut aktif dalam pengambilan keputusan perusahaan. Pengukuran variabel ini berdasarkan jumlah proporsi saham umum yang dipegang oleh anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi

3. Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan akan berdampak terhadap kualitas keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Variabel ini diukur berdasarkan jumlah anggota dari Dewan Komisaris di dalam perusahaan.

4. Proporsi Komisaris Independen dalam Dewan Komisaris

Proporsi komisaris independen dalam dewan komisaris meningkatkan aktivitas pengawasan. Hal ini juga meningkatkan independensi dari dewan tersebut. Pengukuran variabel ini berdasarkan persentase proporsi komisaris independen dibandingkan dengan jumlah keseluruhan komisaris.

$$R_KI = \text{Komisaris Independen} / \text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris}$$

5. *Size*

Variabel Ukuran perusahaan menyatakan besar kecilnya suatu perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan Subramaniam, *et al.*, (2009), ukuran perusahaan diukur dengan menjumlahkan total aset

perusahaan. Pernyataan tersebut didukung penelitian sebelumnya, menggunakan *total assets*, hal tersebut didasarkan pada penelitian Dyreng, *et al.*, (2007). Semakin besar total asset perusahaan, maka semakin besar pula ukuran suatu perusahaan. Selain itu, asset menunjukkan aktiva yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan.

$$\text{SIZE} = \log \text{ of Total Aset}$$

3.1.2 Variabel Dependen

1. Rapat Dewan Komisaris

Aktivitas pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris. Pada penelitian sebelumnya aktivitas pengawasan oleh Dewan Komisaris maupun Komite Audit diukur melalui frekuensi rapat. Pada penelitian ini, pengukuran variabel ini diukur melalui jumlah rapat Dewan Komisaris yang diadakan selama tahun 2011.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan kelompok orang, peristiwa atau hal yang ingin peneliti investigasi (Sekaran 2003:265) Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2011. Teknik pengambilan sampel yaitu *purposive sampling*. *Purposive Sampling* adalah penentuan sampel dari populasi yang ada berdasarkan kriteria yang dikehendaki oleh peneliti. Total terdapat 73 perusahaan yang datanya dapat digunakan dalam penelitian ini. Kriteria yang digunakan dalam penentuan sampel penelitian ini adalah :

1. Perusahaan *non* perbankan yang terdaftar sebagai perusahaan *go public* di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011.
2. Perusahaan yang menerbitkan *Annual Report* periode tahun 2011.
3. Datanya lengkap dan siap untuk diteliti.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapatkan dari *Indonesia Capital Market Directory* (ICMD) dan Bursa Efek Indonesia. Metode pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah :

a. Dokumentasi

Yaitu metode pengumpulan data yang berasal dari pencatatan sumber atau publikasi lain (Sugiyono, 2004). Metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan seluruh data sekunder berupa *annual report* perusahaan *non finansial* yang diperoleh dari *Indonesia Capital Market Directory* (ICMD).

b. Studi Pustaka

Metode studi pustaka dilakukan dengan menggunakan berbagai literature yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.4 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah regresi berganda (*multiple regression analysis*). Untuk menjamin keakuratan data, maka sebelum dilakukan analisis regresi untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini, dilakukan terlebih dahulu analisis statistik deskriptif. Selain itu, dilakukan pengujian kelayakan model regresi untuk menilai model regresi.

Berikut ini penjelasan terperinci mengenai metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini :

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan variable – variable dalam penelitian ini. Alat analisis yang digunakan adalah rata – rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, minimum dan distribusi frekuensi (Ghozali,2011). Statistik deskriptif menyajikan ukuran – ukuran numerik yang sangat penting bagi sampel.

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Pada penelitian ini juga akan dilakukan pengujian penyimpangan asumsi klasik terhadap model regresi yang telah diolah yang meliputi :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau nilai residual memiliki distribusi normal agar uji statistik untuk jumlah sampel kecil hasilnya tetap valid (Ghozali, 2011). Terdapat dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan cara analisis grafik dan uji statistik.

1. Analisis Grafik

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Namun, cara ini dapat menyesatkan jika digunakan untuk sampel kecil. Metode yang lebih

handal adalah dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk garis lurus diagonal dan *plotting* data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal tersebut. Jika distribusi variabel residual normal, maka garis yang menggambarkan variabel sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

2. Analisis Statistik (Uji Statistik Non Parametrik Kolmogorov-Smirnov)

Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah dengan uji statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji ini diyakini lebih akurat daripada uji normalitas dengan grafik, karena uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan, jika tidak hati-hati secara visual akan terlihat normal (Ghozali, 2011). Uji K-S dapat dilakukan dengan membuat hipotesis:

H_0 : Data residual berdistribusi normal

H_1 : Data residual tidak berdistribusi normal.

Apabila *asymptotic significance* lebih besar dari 5 persen, maka variabel terdistribusi normal (Ghozali, 2005).

b. Uji Multikolinearitas

Tujuan dari uji multikolinearitas adalah menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolinearitas diantara variabel independen (Ghozali, 2011). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dalam penelitian ini dengan melihat (1) matrik korelasi antar variabel-

variabel independen (termasuk variabel kontrol), (2) nilai *tolerance*, dan (3) *variance inflation factor* (VIF). Indikator untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah jika besaran korelasi matrik antar variabel independen $>0,90$, nilai *tolerance* $\leq 0,10$, dan nilai VIF ≥ 10 .

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas, yaitu keadaan ketika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Kebanyakan data *crosssection* mengandung situasi heterokedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, besar).

Uji heterokedastisitas yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan dua cara, yaitu :

1. Analisis Grafik Plot

Yaitu dengan cara melihat Grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual yang telah di-studentized (Ghozali, 2011).

Dasar analisisnya adalah jika ada pola tertentu (membentuk pola tertentu yang teratur) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.

Tetapi jika tidak ada pola yang jelas, titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).

2. Uji Glejser

Uji glejser adalah metode untuk menguji ada-tidaknya heteroskedastisitas dengan cara meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen dengan persamaan regresi :

$$|U_t| = \alpha + \beta X_t + v_t$$

Apabila variabel independen tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).

3.4.3 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*) dikarenakan model regresi memiliki variabel independen lebih dari dua. Persamaan model regresi sebagai berikut :

Model Regresi :

$$\text{RDK} = \alpha + \beta_1 (\text{K}_\text{Kepi}) + \beta_2 (\text{K}_\text{Mani}) + \beta_3 (\text{J}_\text{DKi}) + \beta_4 (\text{R}_\text{KLi}) + \beta_5 (\text{Sizei}) + e_i$$

dimana :

RDK = Jumlah rapat Dewan Komisaris periode tahun 2011.

K_Kep	= Konsentrasi Kepemilikan, persentase dari saham biasa oleh pemilik saham terbesar.
K_Man	= Kepemilikan manajerial, persentase saham biasa yang dimiliki oleh Komisaris dan Direksi.
J_DK	= Ukuran Dewan Komisaris, dihitung dari jumlahnya.
R_KI	= Komposisi Dewan Komisaris, proporsi Komisaris Independen per total angka anggota Dewan Komisaris.
Size	= Ukuran perusahaan, diukur dengan logaritma natural dari total aset.

Uji hipotesis yang penulis lakukan yaitu :

a. Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Secara umum, koefisien determinasi untuk data *cross section* relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan sedangkan untuk data *time series* biasanya memiliki nilai koefisien determinasi yang tinggi. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan

satu variabel independen, maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan *Adjusted R²* pada saat mengevaluasi mana model regresi yang terbaik. Kenyataannya, nilai *Adjusted R²* dapat bernilai negatif walaupun yang dikehendaki bernilai positif. Jika dalam uji empiris terdapat nilai *Adjusted R²* negatif, maka nilai *Adjusted R²* dianggap bernilai nol (Ghozali, 2011).

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi memiliki pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Apabila nilai probabilitas signifikansi < 0.05 , maka variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.

c. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t dimaksudkan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Selain untuk uji pengaruh, uji ini juga dapat digunakan untuk mengetahui tanda koefisien regresi masing-masing variabel bebas sehingga dapat ditentukan arah pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Apabila nilai probabilitas signifikansi < 0.05 , maka suatu variabel independen merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.